

Tanggapan balik buat Rizal Mallarangeng

Kapitalisme dan Kebudayaan

Ariel Heryanto

RIZAL Mallarangeng (*Bernas*, 6/8/91) benar, kaitan kapitalisme dan kebudayaan tak mungkin dibahas secara memadai dalam sebuah artikel koran seperti ini. Apalagi jika pengetahuan pembahasannya masih sangat terbatas, seperti dalam kasus tulisan saya (*Bernas*, 30/7/91) yang ditanggapi Rizal.

Saya memberanikan diri untuk menyinggung kapitalisme dalam kaitan dengan kebudayaan karena beberapa dorongan. Pertama, saya percaya pandangan para ahli bahwa kapitalisme merupakan dasar terpenting dari tata masyarakat dan sejarah umat manusia di seluruh planet bumi pada masa ini. Mustahil memahami secara mendalam apa pun yang berkait dengan manusia dan masyarakat mutakhir tanpa pemahaman minimal tentang kapitalisme. Sejarah kita dua abad terakhir adalah sejarah kapitalisme.

Bagian pertama dari dua tulisan

Bayangkan jika soal terpenting ini harus dihindarkan dari halaman koran hanya karena rumit dan besarnya persoalan yang dikandungnya. Soal-soal seperti suksesi, pemilu, demokrasi, pembangunan atau keadaan kini banyak dipersoalkan koran kita bukan karena soal-soal itu sempit dan sederhana.

Kedua, ternyata soal terpenting kapitalisme belum cukup mendapatkan perhatian secara memadai dalam masyarakat

mutakhir kita. Saya tak perlu – dan jelas tak berani – menulis tentangnya seandainya mereka yang jauh lebih ahli telah membahasnya berpanjang-lebar. Bahan-bahan perkuliahan yang wajib diikuti para mahasiswa kita, yakni Ilmu Sosial Dasar dan Ilmu Budaya Dasar, tak (banyak) membahas tentang kapitalisme.

Ketiga, dari perbincangan yang minim, kapitalisme biasanya dibahas di kalangan pengamat masalah ekonomi dan politik. Bidang kebudayaan umumnya dan kesenian khususnya seakan-akan asing dengan acuan pada kapitalisme. Bahkan, diskusi yang membahas kaitan seni dan tata masyarakat biasanya tak menyinggung dinamika kapitalisme.

Perang tiga bersaudara

Saya teringat sebuah diskusi yang diadakan Yayasan Kalimasada Yogyakarta. Topiknya seni dan politik, menyusul pelanggaran pentas Teater Koma tahun lalu. Di situ Emha Ainun Nadiih mengemukakan bahwa ada tiga kiblat kegiatan berteater di Yogyakarta masa kini: (a) yang berobsesi dengan estetika (seni untuk seni); (b) yang menajakan tontonan hiburan (seni untuk pasar); (c) yang berprihatin pada ketidakadilan sosial (seni untuk masyarakat). Dalam diskusi itu, seperti dalam peta intelektualisme Indonesia masa kini, Emha tampil sebagai pengamat yang paling jitu menunjuk gejala-gejala sosial. Tapi sayangnya penggambaran gejala itu

biasanya, seperti dalam diskusi tadi, tak disertai analisis yang menjelaskan proses sosial apa yang bekerja di bawah permukaan gejala itu, yang membentuk dan mengangkatnya ke permukaan.

Sementara kita bisa sepenuhnya setuju dengan gambaran yang diberikan Emha, kita bisa mengatakan bahwa tiga kiblat yang sama sebenarnya dapat dijumpai dalam semua masyarakat bercorak kapitalistik. Tidak unik Yogyakarta masa kini.

Mustahil memahami secara mendalam apapun yang berkait dengan manusia dan masyarakat mutakhir tanpa pemahaman minimal tentang kapitalisme. Tapi ternyata soal terpenting kapitalisme belum cukup mendapat perhatian dalam masyarakat mutakhir kita. . . . dari perbincangan yang minim, kapitalisme biasanya dibahas di kalangan pengamat masalah ekonomi dan politik. Bidang kebudayaan umumnya dan kesenian khususnya seakan-akan asing dengan acuan pada kapitalisme.

Bahkan tidak hanya Indonesia. Ketiganya merupakan produk dan/atau reaksi terhadap kapitalisme. Karena kapitalisme biasanya tidak disinggung dalam diskusi kesenian (juga tidak pada diskusi di atas), terbentuknya ketiga kiblat itu tidak terlepas.

Masing-masing penganut kiblat saling mengejek dan bermusuhan. Pertentangan mereka menjadi warna dominan pergaulan seniman Indonesia dalam dua dekade belakangan. Yang

berobsesi estetika dianggap buta, picik atau angkuh terhadap masalah sosial. Padahal awalnya kiblat ini merupakan perlawanan radikal terhadap reduksi estetika pada nilai materialistik-utilitas-pragmatik-komoditi. Kesenian yang laris diperdagangkan disebut bukan karya seni. Padahal dia bisa menjadi idola yang paling memasyarakat. Yang berprihatin pada masalah sosial disebut memperlak kesenian. Padahal kiblat ini dimaksudkan sebagai bagian

ganya, maka tak muncul kesadaran bahwa baru belakangan saja ketiganya muncul secara menonjol dalam sejarah sosial kita. Sebelum kolonialisme dan kapitalisme masuk ke wilayah kepulauan Nusantara, hampir semua kegiatan yang kini disebut "kesenian" berkiblat ke nilai sakral atau politik keraton yang disakralkan. Ketiga kiblat di atas tak ada.

Sebelum pembahasan ini diteruskan, mungkin perlu dicatat beberapa pertanyaan historis yang penting. Mengapa pembahasan, dan terlebih-lebih lagi analisis kritis, terhadap kapitalisme sangat langka dan terbatas dalam masyarakat mutakhir kita? Mengapa di antara pembahasan yang minim tentang kapitalisme selama ini, ekonomi dan politik menjadi forum utamanya, bukan kebudayaan dan kesenian? Bagaimana sikap dan isi pembicaraan orang Indonesia masa kini tentang kapitalisme? Mengapa begitu?

Semua pertanyaan di atas dan jawabannya menjelaskan apa? Kesalahan teknis? Atau lebih serius? Gejala keilmuan? Kebudayaan? Politik? Ekonomi?

Bahasa dan kekuasaan

Jelas semua ini membutuhkan pembahasan tersendiri. Saya tak berpretensi mampu menjawabnya secara tuntas di sini atau di mana pun. Tapi demi jelasnya, mungkin perlu dicatat ringkas mungkin beberapa kemungkinan jawabnya.

Tampaknya ada alasan historis yang membatasi perbincangan tentang kapitalisme di Indonesia masa kini. Masyarakat mutakhir kita, yang biasa ditan-

di dengan disebut Orde Baru, merupakan masyarakat yang bangkit dari dua kejadian besar. Pertama, masa pra-1965 ditandai oleh hiruk-pikuk adu slogan dan propaganda di samping adu-adu kekuatan dalam berbagai bentuk lain. Kapitalisme, imperialisme, birokrat, revolusi adalah sebagian dari kata-kata kunci dalam adu slogan itu. Kedua, peralihan masa pra dan pasca 1965 itu merupakan salah satu trauma berbanjir darah paling dahsyat yang tercatat dalam sejarah umat manusia abad ini dan masih menjadi teka-teki para ahli ilmu jiwa maupun sejarah di dunia.

Bisa dipahami jika pada masa itu generasi tua kita enggan membicarakan kapitalisme, biarpun kata itu seperti halnya sosialisme, komunisme, nasionalisme atau Islam merupakan kata-kata paling penting dalam seluruh sejarah terbentuknya bangsa-negara Indonesia dari awal abad ini hingga tahun 1965.

Tapi ada beberapa alasan lain yang tak khas Indonesia. Istilah "kapitalisme" (berbeda dari kapitalis dan kapital) baru muncul pada abad ke-19 dan muncul sejak awalnya bukan sebagai kata yang bebas nilai. Kata itu menyebar dengan nilai serba negatif. Bandingkan dengan istilah "Orde Lama" yang tak pernah terdengar pada masa hidupnya Orde yang disebut Lama itu. Kapitalisme, dalam pengertian suatu tahap sejarah sosial atau sistem gagasan atau suatu tata sosial, tak dimonopoli tapi lebih banyak dipakai oleh para sarjana Marxis. Dengan terlarangnya Marxisme-Lenin-

me di Indonesia sejak tahun 1966, bukan saja pembahasan tentang Marxisme tetapi juga kapitalisme semakin terbatas. Padahal perbincangan tentang kapitalisme tidak harus bercorak atau berpihak pada Marxisme.

Dari kebanyakan pembahasan yang terbatas tentang kapitalisme di Indonesia maupun di luar Indonesia (Wallerstein, 1988) ada dua sikap mendua yang saling bertentangan. Di satu pihak, kapital, kapitalis dan kapitalisme diunggulkan sebagai ujung tombak modernisasi, pembangunan, kemajuan dan kesejahteraan serta peradaban masa depan. Tapi yang penting dicatat, kampanye demikian tidak menggunakan istilah-istilah kapitalis dan kapitalisme. Kapitalis atau borjuis disebut sebagai wiraswasta, pengusaha, usahawan dan dengan malu-malu belakangan disebut konglomerat. Sedang kapitalisme yang saat ini mele-dak-ledak disebut sebagai industrialisasi, modernisasi, pembangunan yang belakangan dihiasi oleh kosmetika bernama globalisasi.

Setiap istilah ternyata membawa bobot nilai sosial yang berbeda. Itu sebabnya penguasa negara-negara Kapitalis tidak bertepuk dada untuk membanggakan diri sebagai pemimpin negara kapitalis. Bahkan di Indonesia justru dikampanyekan penyangkalan bahwa Indonesia bukan negara kapitalistik. Beberapa pihak tersinggung dan membantah ketika pejabat negara yang menuding para lulusan UI sebagai para calon kapitalis.

Kapitalisme — — —

Sambungan dari hal. 4

Tapi pada saat yang sama semua nilai, sikap dan sifat ideal milik borjuis atau kapitalis dikampanyekan di Indonesia: berhemat, rasional, tekun dan rajin, bekerja efisien, rajin menabung, kreatif dan produktif. Semua ini membentuk seperangkat doktrin dan nilai resmi yang tidak harus sesuai "secara murni dan konsekuen" dengan praktek sosial sehari-hari. Ketika kita menemukan etos kerja borjuis itu pada kelompok tertentu dalam masyarakat Indonesia, kita terperanjat dan mulai menolak dan mengejek. Kita mempertanyakan nilai-nilai yang baru: solidaritas sosialnya, patriotismenya, nasionalismenya, bahkan keturunannya. Semua ini menjelaskan apa?

Pertama, pemahaman tentang kapitalisme merupakan persya-

ratan mutlak untuk memahami sebagian terbesar gejala dan proses sosial mutakhir. Kedua, langka atau minimnya pembahasan dan pemahaman tentang kapitalisme di Indonesia masa kini merupakan satu contoh bagaimana sebuah gejala merupakan produk dan proses sejarah sosial. Bukan sebuah kebetulan! Ketiga, bahasa tidak pernah netral. Bahasa tidak saja memberi bobot nilai yang berpihak sebatas kata per kata, tetapi juga menonjolkan sebagian dari realitas untuk dibicarakan serta mengubur bagian yang lain sehingga seakan-akan tak ada.***

(Bersambung)

**) Penulis adalah kandidat PhD pada Monash University, Australia, dan dosen Fakultas Pasca Sarjana UKSW, Salatiga.*
